

**METODOLOGI PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM NONFORMAL:
PENDEKATAN STUDI KASUS DAN TANTANGAN KONTEMPORER****Kelik Wardiyono¹, Abdul Matin Bin Salman², Muhammad Munadi³**UIN Raden Mas Said Surakarta^{1,2,3}.e-mail: klik.wouw@gmail.com, abdulmatin@staff.uinsaid.ac.id,
munadimahdiputra@gmail.com

Diterima: 20/8/2026; Direvisi: 3/9/2026; Diterbitkan: 9/9/2026

ABSTRAK

Artikel ini membahas metodologi penelitian kebijakan pendidikan Islam pada lembaga nonformal, khususnya kuttab, dengan pendekatan studi kasus kebijakan (*policy case study*) beserta tantangan kontemporer dalam pelaksanaannya. Di Indonesia, kajian kebijakan formal dan metode kuantitatif administratif sangat dominan, sementara logika tata kelola berbasis nilai di lembaga nonformal tidak sepenuhnya terungkap dalam kerangka PPDB konvensional. Penerimaan Santri Baru (PSB) Kuttab Ibnu Abbas yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* menjadi lokus studi untuk mengkaji metodologi penelitian kebijakan lembaga Islam nonformal. Melalui sintesis literatur dan refleksi praktis, artikel ini membahas karakteristik objek, rasionalitas studi kasus, serta integrasi analisis dokumen dan wawancara dengan para aktor kebijakan. Penilaian dilakukan menggunakan analisis tematik dan pemetaan kesenjangan antara regulasi dan praktik (*policy-practice gap*). Riset ini menghasilkan kerangka prosedural lima tahap (definisi kasus, pemetaan aktor, pengumpulan data multi-metode, analisis kesenjangan kebijakan, dan sintesis analitik) yang memotret tantangan nyata di lapangan, mulai dari fragmentasi dokumen, pengaruh budaya organisasi, digitalisasi yang inklusif, hingga batasan dalam generalisasi temuan. Rumusan ini diharapkan menjadi panduan metodologis yang tangguh, etis, dan kontekstual bagi peneliti serta praktisi manajemen pendidikan.

Kata Kunci: *Kuttab, Metodologi Penelitian Kebijakan, Pendidikan Islam Nonformal, Policy-Practice Gap, Studi Kasus Kebijakan*

ABSTRACT

This article examines the methodology of Islamic education policy research within non-formal institutions, specifically the kuttab, utilizing a policy case study approach alongside its contemporary implementation challenges. In Indonesia, formal policy studies and administrative quantitative methods predominate, whereas the value-based governance logic of non-formal institutions remains inadequately captured within conventional student admission frameworks. The New Student Admission (PSB) at Kuttab Ibnu Abbas, selected via purposive sampling, serves as an empirical locus for investigating policy research methodology in non-formal Islamic organizations. Drawing upon literature synthesis and practical reflections, this article outlines object characteristics, case study rationales, and the integration of multi-source document analysis with policy actor interviews. Assessments were conducted using thematic analysis and policy-practice gap mapping. The study yields a five-stage procedural framework (case definition, actor mapping, multi-method data collection, policy gap analysis, and analytical synthesis) addressing real-world field constraints, including document fragmentation, organizational culture dynamics, inclusive digitalization, and analytical

generalization boundaries. This methodological framework provides a robust, ethical, and context-sensitive guide for educational researchers and management practitioners.

Keywords: *Kuttab, Non-Formal Islamic Education, Policy Case Study, Policy Research Methodology, Policy-Practice Gap*

PENDAHULUAN

Penelitian kebijakan pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam pengembangan ilmu manajemen pendidikan Islam. Kebijakan pendidikan tidak hanya mencakup regulasi nasional, seperti Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (2025), melainkan juga kebijakan operasional lembaga yang mengatur seleksi, akses, komunikasi, dan evaluasi pendidikan. Ball (2003) menegaskan bahwa kebijakan pendidikan diproduksi melalui relasi kekuatan, ideologi, dan dinamika institusi, sehingga penelitian kebijakan memerlukan pendekatan yang mampu menangkap kompleksitas konteks, aktor, dan praktik di lapangan.

Di Indonesia, metodologi penelitian kebijakan pendidikan lazimnya dikembangkan pada sektor formal. Studi implementasi PPDB pada sekolah menengah negeri, misalnya, menggunakan teori Van Meter dan Van Horn untuk menganalisis kejelasan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksana, disposisi, komunikasi, dan lingkungan sosial (Lestari & Rosdiana, 2018). Penelitian serupa pada sekolah Islam terintegrasi dan pesantren terpadu melaporkan pola operasional panitia, seleksi administratif-akademik, dan mekanisme daring (Ali et al., 2023; Rosalinda, 2019; Superizal, 2022). Namun, kajian metodologis yang secara eksplisit membahas pendekatan penelitian kebijakan dalam pendidikan Islam nonformal, termasuk kuttab sebagai rekonstruksi pendidikan Islam klasik, masih relatif terbatas.

Kuttab dan lembaga sejenis memiliki karakteristik tata kelola yang berbeda dari sekolah formal. Kurikulum berpusat pada iman (tauhid) dan Al-Qur'an melalui hafalan, diskusi, dan keteladanan, yang menegaskan relevansi kuttab terhadap pertumbuhan pesantren tahfidz di Indonesia (Ibda & Wijayanti, 2023; Suja'i & Faujih, 2022). Kebijakan operasional seperti Penerimaan Santri Baru (PSB) sering kali berjalan berdasarkan budaya organisasi, pengalaman tahunan, dan keputusan *ad hoc*, bukan berdasarkan dokumen kebijakan formal yang terintegrasi. Kondisi ini menuntut metodologi penelitian kebijakan yang sensitif terhadap konteks, mampu menganalisis kesenjangan antara kebijakan tertulis dan praktik di lapangan (*policy-practice gap*), serta mengidentifikasi aktor kebijakan di luar struktur birokrasi sekolah formal (Anwar et al., 2025; Fionita et al., 2024; Hidayati et al., 2026; Nurhayati et al., 2025; Stacey & Mockler, 2024).

Meskipun literatur manajemen pendidikan Islam telah berkembang pesat, belum banyak artikel yang secara sistematis merumuskan metodologi penelitian kebijakan pendidikan Islam nonformal: mulai dari pemilihan desain, teknik pengumpulan data, analisis, validitas, hingga tantangan kontemporer. Ketiadaan landasan metodologis ini berisiko membuat penelitian kebijakan pada kuttab dan lembaga sejenis hanya mengadopsi kerangka PPDB formal secara mekanis, tanpa memperhitungkan logika normatif *tarbiyah* serta dinamika komunitas yang menjadi ciri lembaga nonformal.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk: (1) menguraikan karakteristik objek dan konteks penelitian kebijakan pendidikan Islam nonformal; (2) menjabarkan pendekatan studi kasus kebijakan sebagai desain penelitian yang relevan; (3) menyusun prosedur metodologis yang meliputi analisis dokumen, wawancara dengan aktor kebijakan, dan

instrumen komplementer; (4) mengidentifikasi teknik analisis data kebijakan; dan (5) menganalisis tantangan kontemporer dalam penelitian kebijakan pendidikan Islam nonformal. Artikel ini bukan laporan temuan substantif kebijakan tertentu, melainkan kontribusi metodologis dengan ilustrasi penerapan pada penelitian kebijakan PSB Kuttab Ibnu Abbas Klaten sebagai contoh bagaimana prosedur metodologis dioperasionalkan dalam konteks nyata.

METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis dengan pendekatan metodologis konseptual, menggunakan desain studi kasus kebijakan (*policy case study*) sebagai kerangka utama (Creswell & Poth, 2018; Yin, 2018). Penyusunan naskah ini menggabungkan sintesis literatur mutakhir tentang kebijakan pendidikan, implementasi PPDB, dan pendidikan Islam nonformal, dengan ilustrasi penerapan prosedur pada kasus kebijakan PSB Kuttab Ibnu Abbas, Klaten, Jawa Tengah. Data ilustrasi kasus diperoleh dari penelitian kebijakan PSB yang dilaksanakan pada Mei sampai Juni 2026. Penentuan subjek dilakukan secara *purposive sampling* berdasarkan kriteria keterlibatan langsung dalam formulasi dan implementasi kebijakan operasional.

Pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur dengan lima aktor kebijakan (kepala kuttab, ketua panitia PSB, bendahara PSB, penanggung jawab syar'i, dan ketua POSKU) serta satu orang wali santri yang tidak mendaftar ulang. Instrumen pedoman wawancara dikembangkan sendiri oleh peneliti dengan mengacu pada dimensi implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn serta divalidasi melalui *expert judgment* oleh dua orang ahli manajemen pendidikan Islam. Pengumpulan data juga mencakup survei kepuasan terhadap $N = 23$ wali santri (skala Likert 1–5), analisis dokumen kebijakan (*standard operating procedure*/SOP, lembar evaluasi internal, brosur biaya, laporan pertanggungjawaban PSB, dan portal digital), serta observasi kegiatan operasional. Analisis data mengikuti tahapan analisis tematik (Braun & Clarke, 2006), analisis kebijakan (*policy analysis*), kerangka implementasi Van Meter dan Van Horn (Lestari & Rosdiana, 2018), serta pemetaan *policy-practice gap* menggunakan daftar periksa enam dimensi kebijakan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu; rekam jejak audit (*audit trail*); serta pemenuhan persetujuan tertulis (*informed consent*) dan penjaminan kerahasiaan identitas informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Karakteristik Objek Penelitian Kebijakan Nonformal

Penelitian kebijakan pendidikan Islam nonformal perlu membedakan secara eksplisit logika kebijakan yang diteliti. Pada sektor formal, kebijakan penerimaan peserta didik berorientasi pada alokasi kuota, transparansi administratif, zonasi, dan tata kelola digital nasional (Lestari & Rosdiana, 2018; Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, 2025). Pada lembaga nonformal seperti kuttab, pesantren tahfidz, maupun majelis taklim berjenjang, kebijakan operasional lazim berorientasi pada kesesuaian nilai *tarbiyah*, kemitraan rumah–sekolah, dan kepercayaan komunitas (Ibda & Wijayanti, 2023; Jannah & Yuwana, 2024b).

Implikasi metodologisnya, peneliti tidak cukup menggunakan indikator keberhasilan PPDB formal (seperti kuota terpenuhi dan kepatuhan zonasi), melainkan perlu mengembangkan indikator kebijakan kontekstual seperti kesesuaian nilai, kepuasan wali santri, keberlanjutan pendidikan, dan rendahnya konflik pascapenerimaan. Ciri metodologis penting lainnya adalah fragmentasi dokumen kebijakan. Kebijakan operasional sering tersebar dalam SOP panitia,

rubrik observasi, selebaran biaya, portal digital, dan dokumen evaluasi tanpa payung regulasi tunggal. Hal ini menuntut peneliti menggunakan analisis dokumen multi-sumber dan wawancara mendalam guna merekonstruksi kebijakan implisit yang tidak tertulis melalui pemetaan aktor kebijakan (*policy mapping*).

Prosedur Studi Kasus Kebijakan

Studi kasus kebijakan (*policy case study*) merupakan desain penelitian kualitatif yang tepat untuk menganalisis formulasi, implementasi, dan dinamika kebijakan dalam konteks nyata (Yin, 2018). Desain ini dipilih apabila penelitian bertujuan menjawab pertanyaan tentang *bagaimana* dan *mengapa* kebijakan beroperasi dalam sistem terikat (*bounded system*) (Creswell & Poth, 2018). Berdasarkan sintesis teori Yin (2018) dan kerangka implementasi (Lestari & Rosdiana, 2018), prosedur studi kasus kebijakan dirumuskan dalam lima tahapan operasional pada Tabel 1.

Tabel 1. Tahapan Prosedur Studi Kasus Kebijakan Pendidikan Islam Nonformal

Tahap	Kegiatan Utama	Luaran (Output)
1. Definisi Kasus	Menentukan unit analisis kebijakan (misal: PSB, kurikulum, pembiayaan) dan batasan konteks kelembagaan.	Proposisi penelitian kebijakan
2. Pemetaan Aktor	Mengidentifikasi formulator, implementator, penerima kebijakan, dan representasi komunitas.	Peta aktor kebijakan (<i>policy actor map</i>)
3. Pengumpulan Data	Mengintegrasikan telaah dokumen, wawancara mendalam, observasi, dan survei penunjang.	Korpus data kualitatif terintegrasi
4. Analisis Kebijakan	Menerapkan analisis tematik, pemetaan <i>policy-practice gap</i> , dan model Van Meter–Van Horn.	Matriks temuan kesenjangan dan pola kebijakan
5. Sintesis dan Rekomendasi	Merumuskan simpulan analitis serta implikasi metodologis dan praktis berbasis bukti lapangan.	Laporan studi kasus kebijakan

Sumber: Sintesis Peneliti (2026).

Tabel 1 merumuskan alur metodologis sistematis dalam menginvestigasi dinamika kebijakan pendidikan Islam nonformal melalui pendekatan studi kasus kualitatif. Prosedur ini memandu peneliti mulai dari pembatasan unit analisis, pemetaan relasi kuasa para pemangku kepentingan (*stakeholders*), integrasi teknik pengumpulan data empiris, hingga evaluasi kesenjangan kebijakan (*policy-practice gap*). Konstruksi tahapan bertingkat ini memastikan penarikan simpulan berbasis bukti yang kontekstual, mendalam, serta memiliki keabsahan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Analisis dokumen operasional dan wawancara semi-terstruktur menjadi instrumen utama dalam merekonstruksi kebijakan implisit. Penggunaan daftar periksa (*checklist*) *policy-practice gap* membandingkan dimensi visi, seleksi, komunikasi, biaya, digitalisasi, dan pemantauan. Penelitian dilengkapi instrumen komplementer berupa survei kepuasan berskala kecil ($N = 23$) sebagai data pendukung awal efektivitas pelayanan, serta wawancara aktor marginal untuk menangkap disparitas ekspektasi.

Ilustrasi Penerapan pada Kasus PSB Kuttab Ibnu Abbas Klaten

Kuttab Ibnu Abbas Klaten mengelola jenjang *tamhidy* hingga *saadis* dengan 45 tenaga pendidik dan 371 santri. PSB tahun ajaran 2026/2027 telah menggunakan portal digital terpadu. Kasus ini dipilih karena merepresentasikan dinamika tata kelola nonformal yang memadukan sistem digital dan pertimbangan nilai keagamaan. Rangkuman operasionalisasi metodologi pada kasus tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan Penerapan Metodologi pada Kasus PSB Kuttab

Komponen Metodologis	Penerapan pada Kasus Empiris	Fungsi Analitis
Analisis Dokumen	SOP panitia, rubrik observasi, selebaran biaya, LPJ, portal digital	Inventarisasi kebijakan tertulis (<i>written policy</i>)
Wawancara Aktor Utama	5 aktor kunci (Kepala, Panitia, Bendahara, Tim Syar'i, POSKU)	Eksplorasi kebijakan implisit dan dinamika pelaksanaan
Wawancara Marginal	1 wali santri yang membatalkan pendaftaran ulang	Identifikasi hambatan akses dan kesenjangan harapan
Survei Penunjang	Kuesioner kepuasan wali santri ($N = 23$, skala Likert)	Indikator awal efektivitas pelayanan administrasi
Analisis Tematik	Protokol 6 tahap Braun dan Clarke (2006)	Pengelompokan tema induktif kebijakan
Policy-Practice Gap	Matriks komparasi 6 dimensi kebijakan	Identifikasi disparitas regulasi versus praktik riil
Analisis Implementasi	Kerangka kerja Van Meter dan Van Horn	Eksplanasi faktor determinan implementasi

Sumber: *Sintesis Peneliti* (2026).

Tabel 2 mengilustrasikan operasionalisasi metodologi studi kasus pada proses penerimaan santri baru untuk menjembatani diskrepansi antara regulasi tertulis (*written policy*) dan dinamika lapangan. Kombinasi analisis dokumen administratif, wawancara pemangku kepentingan utama, serta pelibatan informan marginal (*marginal voices*) terbukti efektif merekonstruksi kebijakan implisit secara komprehensif. Pendekatan multimetode yang dipadukan dengan analisis tematik dan model implementasi ini berhasil memetakan determinan tata kelola berbasis nilai keagamaan secara utuh.

Tantangan Kontemporer dan Respons Metodologis

Penelitian kebijakan nonformal menghadapi sejumlah tantangan spesifik yang dirangkum pada Tabel 3 beserta strategi penanganannya.

Tabel 3. Tantangan Kontemporer dan Respons Metodologis

Tantangan Lapangan	Manifestasi pada Lembaga Nonformal	Respons dan Solusi Metodologis
Dominasi Kerangka Formal	Bias indikator teknokratis-kuantitatif	Menyusun indikator berbasis nilai dan orientasi <i>tarbiyah</i>
Kebijakan Implisit	Regulasi bertumpu pada kesepakatan lisan	Wawancara mendalam multi-aktor dan observasi partisipatif
Fragmentasi Dokumen	Arsip tersebar di berbagai unit kerja	Analisis dokumen multi-sumber dan verifikasi silang
Keterbatasan Sampel Survei	Responden survei berskala kecil (N terbatas)	Memosisikan data survei sebagai triangulator deskriptif
Akses Digitalisasi	Ketimpangan literasi gawai pada orang tua	Menilai aspek inklusivitas digital dan kemudahan akses

Keterbatasan Generalisasi	Kontekstualisasi lokal yang sangat unik	Mengembangkan generalisasi analitik (<i>analytical generalization</i>)
----------------------------------	---	--

Sumber: Sintesis Peneliti (2026).

Tabel 3 memetakan resolusi metodologis kontekstual dalam memitigasi aneka kendala epistemologis pada riset institusi nonformal. Strategi yang ditawarkan merespons bias formalisme teknokratis dengan mengadopsi indikator berbasis nilai kelembagaan, menembus aturan lisan melalui wawancara mendalam, serta mengatasi arsip yang terfragmentasi lewat verifikasi silang (*cross-checking*). Pendekatan adaptif ini menjaga akurasi interpretasi data empiris sekaligus memperkuat keabsahan generalisasi analitik (*analytical generalization*) pada lanskap sosial-keagamaan yang unik.

Pembahasan

Karakteristik objek penelitian kebijakan pendidikan Islam nonformal terbukti memiliki logika operasional yang berbeda secara fundamental dari sektor formal. Kebijakan formal lazimnya berfokus pada alokasi kuota, transparansi administratif, serta kepatuhan zonasi (Lestari & Rosdiana, 2018; Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, 2025). Sebaliknya, tata kelola lembaga nonformal bertumpu pada kesesuaian nilai *tarbiyah*, kemitraan rumah dan sekolah, serta kepercayaan komunitas (Ibda & Wijayanti, 2023; Jannah & Yuwana, 2024b). Penerapan kurikulum yang berpusat pada tauhid dan Al-Qur'an menuntut penyesuaian indikator kebijakan kontekstual guna menghindari reduksionisme administratif (Suja'i & Faujih, 2022). Sebagaimana ditegaskan bahwa kebijakan merupakan produk pertarungan nilai dan wacana kekuasaan (Ball, 2003), studi kasus kebijakan terbukti menjadi instrumen metodologis yang tepat untuk membongkar kebijakan implisit di balik kepemimpinan karismatik (Creswell & Poth, 2018; Yin, 2018).

Penerapan prosedur studi kasus lima tahap berhasil memperluas wacana implementasi kebijakan pendidikan yang selama ini didominasi oleh kajian sekolah formal (Ali et al., 2023; Superizal, 2022). Penggunaan model Van Meter dan Van Horn terbukti kokoh dalam menganalisis disposisi pelaksana dan komunikasi antarorganisasi di tengah fragmentasi regulasi tertulis. Melalui penelusuran dokumen multisumber dan pemetaan aktor, disparitas antara regulasi tertulis dan praktik lapangan dapat diidentifikasi secara presisi. Pelibatan informan marginal dalam proses wawancara juga membuktikan adanya kesenjangan harapan wali santri terhadap tata kelola kelembagaan. Temuan ini menegaskan pentingnya membangun komunikasi berbasis kepercayaan serta pelibatan orang tua sejak tahapan awal seleksi penerimaan murid baru (Bossetti, 2004; Jannah & Yuwana, 2024a; Schneider & Buckley, 2002).

Implikasi dari penelitian ini memberikan kontribusi metodologis dan praktis yang berharga bagi tata kelola pendidikan Islam nonformal. Secara praktis, pengelola lembaga nonformal disarankan untuk menyusun pedoman operasional baku yang terintegrasi secara tertulis guna menjembatani kesepakatan lisan yang rentan memicu miskomunikasi. Digitalisasi pendaftaran santri baru juga harus mengedepankan prinsip inklusivitas pelayanan dan kemudahan akses bagi orang tua yang memiliki keterbatasan literasi teknologi (Rosalinda, 2019). Secara metodologis, riset ini memberikan panduan terstruktur bagi peneliti kebijakan dalam mengembangkan indikator evaluasi berbasis nilai keagamaan daripada indikator teknokratis. Pembuat kebijakan di kementerian agama dapat memanfaatkan kerangka kerja ini sebagai acuan dalam membina akuntabilitas lembaga pendidikan nonformal secara adaptif tanpa menghilangkan keunikan identitas kulturalnya.

Meskipun menyajikan kerangka metodologis yang sistematis, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu dipertimbangkan untuk riset selanjutnya. Penelitian ini terbatas pada lokus kasus tunggal di Kuttab Ibnu Abbas Klaten dengan ukuran sampel survei pelengkap yang relatif kecil, sehingga temuan empirisnya belum mencakup keragaman model tata kelola pesantren atau majelis taklim lainnya. Oleh karena itu, klaim temuan diarahkan pada *analytical generalization* untuk mentransfer prosedur metodologis pada institusi sejenis, bukan generalisasi statistik populasi. Penelitian berikutnya disarankan menerapkan desain studi multikasus komparatif yang membandingkan berbagai tipologi lembaga pendidikan Islam nonformal di wilayah perkotaan dan perdesaan. Peneliti lanjutan juga direkomendasikan untuk memperluas survei kuantitatif guna memvalidasi efektivitas instrumen evaluasi kebijakan secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa studi kebijakan pada lembaga pendidikan Islam nonformal menuntut reorientasi metodologis dari pendekatan administratif formal menuju pendekatan studi kasus kebijakan (*policy case study*) yang sensitif nilai dan konteks. Melalui ilustrasi kasus PSB Kuttab Ibnu Abbas Klaten, prosedur metodologis lima tahap yang memadukan telaah dokumen multi-sumber, pemetaan aktor, wawancara mendalam informan kunci dan marginal, serta analisis kesenjangan (*policy-practice gap*) terbukti efektif dalam merekonstruksi kebijakan implisit di tengah tantangan fragmentasi dokumen dan budaya organisasi berbasis paguyuban. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mereplikasi kerangka metodologis ini pada lembaga pendidikan Islam nonformal lainnya secara komparatif (*multi-case study*), mengembangkan instrumen baku daftar periksa kesenjangan kebijakan berbasis konsensus pakar, serta mengintegrasikan pendekatan metode campuran (*mixed-methods*) guna memperkaya evaluasi dampak kebijakan berbasis komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. A., Azhari, H., Fronica, I., Azwardi, M., Asmendri, & Sari, M. (2023). Mekanisme penerimaan peserta didik baru di Pesantren Terpadu Serambi Mekkah Padang Panjang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 22562–22569. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.10178>
- Anwar, C., Komariyah, L., Aznem, A., Hasbar, H., Payung, L. T., & Kesuma, A. H. (2025). Evaluasi kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia: Pendekatan CIPP dan perspektif keadilan sosial. *Journal of Education Research*, 6(3), 739–750. <https://doi.org/10.37985/jer.v6i3.2576>
- Ball, S. J. (2003). The teacher's soul and the terrors of performativity. *Journal of Education Policy*, 18(2), 215–228. <https://doi.org/10.1080/0268093022000043065>
- Bossetti, L. (2004). Determinants of school choice: Understanding how parents choose elementary schools in Alberta. *Journal of Education Policy*, 19(4), 387–405. <https://doi.org/10.1080/0268093042000227465>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

- Fionita, W., Lauchia, R., Windari, S., & Wijaya, H. A. (2024). *Monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(6), 5732–5739. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i6.4535>
- Hidayati, N., Hermiati, H., Muhlisin, M., & Fauyan, M. (2026). Model analisis kebijakan heuristik, evaluatif, dan kritis dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam. *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 6(1), 23–34. <https://doi.org/10.37329/metta.v6i1.5191>
- Ibda, H., & Wijayanti, D. M. (2023). Sejarah, kurikulum, dan pembelajaran pada kuttab: Kajian literatur sistematis tahun 2013-2023. *Zahra: Research and Thought Elementary School of Islam Journal*, 4(1), 1–23. <https://doi.org/10.37812/zahra.v4i1.814>
- Jannah, I. W. T., & Yuwana, R. Y. (2024a). Mewujudkan sekolah Islam ramah perbedaan: Edukasi toleransi bagi siswa sekolah dasar di Klaten. *Akselerasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 149–153. <https://doi.org/10.70210/ajpm.v2i2.129>
- Jannah, I. W. T., & Yuwana, R. Y. (2024b). Optimalisasi pendidikan Islam di kuttab: Strategi untuk meningkatkan pemahaman anak-anak terhadap nilai-nilai Islam. *Akselerasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 86–91. <https://doi.org/10.70210/ajpm.v2i1.39>
- Lestari, H. A., & Rosdiana, W. (2018). Implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun tahun 2017. *Publika*, 6(5), 1–7. <https://doi.org/10.26740/publika.v6n5.p1-7>
- Nurhayati, N., Sahara, A., Salsabila, F., Auliya, J., Zannah, M. C., Simangunsong, S. A. T., & Rahma, S. (2025). Aktor kebijakan sebagai penggerak perubahan: Studi kasus implementasi kebijakan pendidikan. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 8(2), 5927–5935. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i2.47435>
- Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru. (2025). Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/315671/permendikdasmen-no-3-tahun-2025>
- Rosalinda, T. N. (2019). Sistem penerimaan peserta didik baru berbasis *online* dan *offline* di sekolah menengah kejuruan. *Jurnal Kajian Teori dan Praktik Kependidikan*, 4(2), 93–101. <https://doi.org/10.17977/um027v4i22019p093>
- Schneider, M., & Buckley, J. (2002). What do parents want from schools? Evidence from the internet. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 24(2), 133–144. <https://doi.org/10.3102/01623737024002133>
- Stacey, M., & Mockler, N. (2024). *Analysing education policy*. Routledge.
- Suja'i, A., & Faujih, A. (2022). Kuttab: Sejarah, tujuan, dan relevansinya dengan pertumbuhan dan perkembangan pesantren tahfidz Al-Qur'an di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 16–27. <https://doi.org/10.37251/jpi.v5i1.624>
- Superizal. (2022). Manajemen kepala sekolah dalam penerimaan peserta didik baru di SD IT Madani. *Journal Ability: Journal of Education and Social Analysis*, 3(4), 15–29. <https://doi.org/10.51178/ability.v3i4.1102>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.